

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Organisasi pergerakan Islam dalam lintasan sejarah Nusantara tidak sekadar hadir sebagai wadah perkumpulan sosial, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan sentral yang secara fundamental membentuk karakter dan arah pergerakan masyarakat di masanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ajid Thohir, eksistensi kelompok-kelompok pergerakan ini memiliki daya pengaruh yang sangat masif karena mereka berhasil mengartikulasikan ideologi perjuangan dan membangun identitas kolektif yang solid di tengah tekanan struktur politik kolonial maupun dinamika sosial saat itu.<sup>1</sup> Besarnya pengaruh historis dan kuatnya akar ideologis dari organisasi Persatuan Islam atau disingkat PERSIS ini menuntut adanya pembacaan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek diskursus pemikiran, tetapi juga pada bagaimana ideologi tersebut dimanifestasikan secara kasat mata. Oleh karena itu, penelitian terhadap konstruksi identitas organisasi ini melalui medium representasi visual—khususnya pakaian—menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diteliti. Dalam perspektif ini, busana yang dikenakan oleh para tokoh Persis bukan lagi diposisikan sebagai sekadar artefak pelindung tubuh, melainkan sebuah teks sejarah dan medium komunikasi non-verbal yang sarat akan mitos serta konotasi ideologis yang mempertegas sikap dan diferensiasi mereka di panggung sejarah.

Sejarah budaya Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika simbol, tradisi, dan representasi visual yang berkembang dalam masyarakat Muslim sejak masa pra-kolonial hingga era modern. Salah satu unsur budaya yang memiliki kedudukan penting dalam konstruksi identitas keagamaan adalah pakaian. Dalam konteks budaya Islam, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga memainkan peran sebagai tanda sosial, simbol ideologis, serta medium

---

<sup>1</sup> Ajid Thohir, *Gerakan Politik Kaum Tarekat dalam Lintasan Sejarah Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 45.

komunikasi yang sarat makna.<sup>2</sup> Berbagai kelompok keagamaan di Indonesia mengekspresikan identitasnya melalui gaya busana tertentu, termasuk kalangan ulama Persatuan Islam (Persis), sebuah organisasi modernis yang berdiri pada tahun 1923 di Bandung.<sup>3</sup> Pada masa kolonial, Persis hadir sebagai gerakan Islam yang mengusung agenda pembaruan (*tajdid*) secara tegas, yang ditandai dengan skripturalisme, rasionalitas teologis, serta kritik terhadap praktik keagamaan tradisional.<sup>4</sup> Pembaruan tersebut tidak hanya tercermin dalam gagasan teologis dan praktik dakwah, tetapi juga terejawantahkan melalui representasi visual, terutama dalam gaya berpakaian para ulamanya. Hal ini tampak dari perbedaan penampilan yang mencolok antara ulama Persis dan kiai tradisional dari lingkungan pesantren Jawa–Sunda. Kiai tradisional umumnya menggunakan sorban besar, jubah panjang, dan atribut kesantrian lainnya, sebagaimana digambarkan Zamakhsyari Dhofier.<sup>5</sup> Sementara itu, ulama Persis lebih sering tampil dengan peci hitam, baju koko putih, atau bahkan jas, yang secara simbolis mengisyaratkan modernitas, kesederhanaan, dan rasionalitas dakwah.<sup>6</sup>

Pilihan pakaian tersebut tidak sekadar menjadi preferensi estetis, tetapi merupakan bagian dari proyek ideologis Persis untuk membangun identitas Muslim Indonesia yang modern, berpengetahuan, dan terlepas dari tradisi yang dianggap tidak berdasar. Dengan demikian, pakaian berfungsi sebagai medium penting dalam merepresentasikan ideologi modernisme Islam. Namun, kajian akademik mengenai Persis selama ini lebih banyak berfokus pada pemikiran teologis, peran tokoh-tokoh utama, aktivitas dakwah, atau kontestasi intelektual organisasi.<sup>7</sup> Aspek budaya dalam bentuk simbol-simbol visual, termasuk pakaian ulama Persis pada masa kolonial, relatif kurang mendapat perhatian.

---

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

<sup>3</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Bandung: Mizan, 1994), 27.

<sup>4</sup> A. Syafii Mufid, *Perkembangan Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1996), 113–115.

<sup>5</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1990), 55.

<sup>6</sup> Federspiel, *Persatuan Islam*, 88–89.

<sup>7</sup> Mufid, *Perkembangan Pemikiran*, 121–140.

Padahal, menganalisis pakaian sebagai simbol budaya merupakan pendekatan signifikan untuk memahami konstruksi identitas dalam sebuah gerakan keagamaan. Melalui analisis simbolik, dapat ditelusuri bagaimana Persis membangun batas identitas (*boundary marking*) antara dirinya dan kelompok lain seperti ulama tradisional, kelompok nasionalis, atau masyarakat priyayi.<sup>8</sup> Dalam konteks kolonial, batas-batas ini tidak hanya mengandung dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi sosial dan politik. Pakaian ulama Persis menjadi bagian dari proses artikulasi visi modernisme Islam yang ingin menegaskan pemisahan antara Islam yang rasional dan bersih dengan tradisionalisme yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemurnian ajaran.

Untuk menjelaskan makna simbolik pakaian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah budaya sebagai pendekatan utama, sementara semiotika digunakan sebagai teori pendukung untuk menafsirkan makna simbolik dari pakaian itu sendiri. Semiotika, sebagaimana dirumuskan Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, mempelajari tanda dan bagaimana tanda menghasilkan makna dalam konteks sosial.<sup>9</sup> Roland Barthes bahkan menekankan bahwa pakaian memiliki dua level makna: denotasi (makna literal) dan konotasi (makna kultural dan ideologis).<sup>10</sup> Dengan kerangka semiotik tersebut, makna kultural dan ideologis pakaian ulama Persis dapat digali lebih dalam.

Pada masa kolonial, representasi visual keislaman memperoleh signifikansi tersendiri mengingat Persis sering berhadapan dengan kelompok tradisional sekaligus kekuasaan kolonial. Penampilan ulama Persis yang ringkas, rapi, dan berwibawa merupakan strategi ideologis untuk membangun citra Islam modern yang rasional, bersih, dan teratur. Howard Federspiel mencatat bahwa tokoh-tokoh Persis sejak awal menampilkan diri dengan pakaian sederhana dan efisien yang mencerminkan kedisiplinan serta karakter pembaruan pemikiran Islam.<sup>11</sup> Gaya ini

---

<sup>8</sup> Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries* (Boston: Little Brown, 1969), 15.

<sup>9</sup> Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics* (Chicago: Open Court, 1983), 67; Charles Sanders Peirce, *Collected Papers*, Vol. 2 (Cambridge: Harvard University Press, 1932), 228.

<sup>10</sup> Roland Barthes, *The Fashion System* (Berkeley: University of California Press, 1990), 17–25.

<sup>11</sup> Federspiel, *Persatuan Islam*, 88–90.

secara sadar dibedakan dari penampilan ulama tradisional yang mengenakan sorban besar, jubah panjang, serta simbol-simbol kesantrian klasik.<sup>12</sup> Pendekatan Persis tersebut juga menjadi bentuk *counter-discourse* terhadap stereotip orientalis yang menggambarkan umat Islam sebagai masyarakat tradisional dan tidak modern, sebagaimana dikritik Edward Said.<sup>13</sup> Dengan demikian, pakaian ulama Persis dapat dipahami sebagai arena artikulasi ideologi dan sekaligus resistensi simbolik terhadap wacana kolonial.

Dalam peta historiografi, kajian mengenai pakaian ulama Persis masih minim eksplorasi. Literatur tentang sejarah Persis, seperti karya Federspiel atau A. Syafii Mufid, memang menyinggung aspek kelembagaan dan pemikiran, namun belum membahas secara mendalam aspek representasi budaya, terutama pakaian sebagai simbol pembaruan.<sup>14</sup> Demikian pula, kajian budaya tentang pakaian Muslim lebih banyak membahas identitas tarekat, pesantren tradisional, atau gerakan perempuan, tetapi belum menyentuh Persis secara spesifik.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang jelas yaitu menelaah pakaian ulama Persis pada masa kolonial sebagai simbol ideologis dalam perspektif sejarah budaya, dengan semiotika sebagai teori bantu untuk membaca lapisan maknanya.

Perbedaan simbolik antara pakaian ulama Persis dan kiai tradisional bukan sekadar persoalan estetika, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam orientasi gerakan, otoritas keagamaan, dan strategi dakwah. Ulama tradisional menggunakan sorban dan jubah sebagai simbol kontinuitas tradisi keilmuan Timur Tengah, sementara ulama Persis memilih tampilan sederhana namun sarat makna yang menekankan purifikasi dan rasionalitas.<sup>16</sup> Pilihan simbolik ini merupakan bagian dari proyek ideologis Persis untuk menunjukkan bahwa kemurnian Islam dapat berjalan seiring dengan modernitas.

---

<sup>12</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 55.

<sup>13</sup> Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1979), 40–41.

<sup>14</sup> Federspiel, *Persatuan Islam*, 27–40; Mufid, *Perkembangan Pemikiran*, 121–150.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), 74–76.

<sup>16</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 52–60.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan dalam kajian sejarah Persis, sejarah budaya pakaian ulama Indonesia, dan kajian semiotik dalam studi Islam Nusantara. Penelitian akan menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, diperkuat oleh analisis semiotik untuk mengungkap makna gaya berpakaian ulama Persis dalam konteks kolonial. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengayaan studi sejarah budaya Islam Indonesia dan membuka perspektif bahwa pakaian bukan sekadar bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan perangkat simbolik yang memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan ideologi dalam gerakan Islam modernis seperti Persis.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan transformasi gaya berpakaian ulama Persis pada periode 1923-1945 dibandingkan dengan kelompok ulama tradisional maupun kaum sekuler pada masa kolonial?
2. Bagaimana gaya berpakaian tersebut dikonstruksikan sebagai simbol identitas Islam modern dalam menghadapi pengaruh budaya Barat dan struktur kekuasaan kolonial di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat apa yang menjadi masalah yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik gaya berpakaian ulama Persis pada periode 1923-1945, serta memetakan perbedaannya secara visual dengan identitas berpakaian kelompok ulama tradisional dan kaum sekuler di masa kolonial.
2. Untuk menjelaskan proses konstruksi gaya berpakaian tersebut sebagai simbol identitas Islam modern, terutama dalam cara ulama Persis merespons

pengaruh kebudayaan Barat dan menempatkan posisi mereka di tengah struktur kekuasaan kolonial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Memberikan kontribusi bagi kajian sejarah budaya Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami peran simbolik pakaian keagamaan pada masa kolonial.
- b. Memperkaya kajian mengenai gerakan modernisme Islam, dengan menambahkan perspektif baru tentang bagaimana identitas keagamaan dibentuk melalui ekspresi visual seperti busana ulama.
- c. Mengembangkan penerapan teori semiotika dalam studi sejarah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang menggabungkan analisis simbol dengan metode sejarah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi sumber pengetahuan bagi organisasi Persatuan Islam (Persis) mengenai sejarah penampilan ulamanya, sehingga dapat memperkuat pemahaman identitas kelembagaan dari perspektif sejarah budaya.
- b. Memberikan referensi bagi para peneliti, mahasiswa, dan akademisi yang tertarik pada studi ulama, pakaian keagamaan, modernisme Islam, atau kajian semiotik dalam konteks Indonesia.
- c. Menjadi bahan edukasi bagi masyarakat untuk memahami bahwa pakaian ulama bukan sekadar atribut fisik, tetapi juga representasi nilai, ideologi, dan strategi dakwah pada masa kolonial.

##### **3. Manfaat Historis**

- a. Mengungkap aspek sejarah yang jarang diteliti, yaitu pakaian ulama Persis pada masa kolonial sebagai simbol perlawanan, pembaruan, dan pembentukan identitas keagamaan.
- b. Menyediakan dokumentasi sejarah yang lebih lengkap mengenai dinamika budaya dan visual dalam gerakan Persis sehingga dapat menjadi arsip penting bagi penelitian sejarah Islam Indonesia.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam membedah genealogi pembentukan identitas suatu pergerakan, penting untuk melihatnya dalam lansekap perkembangan peradaban Islam yang lebih luas, di mana institusi sosial dan keagamaan selalu lahir sebagai respons terhadap dinamika zaman. Ajid Thohir menegaskan bahwa setiap pergeseran peradaban di kawasan dunia Islam selalu berkelindan dengan benturan kebudayaan, penetrasi politik eksternal, dan upaya internal kelompok untuk merumuskan kembali jati dirinya secara mandiri.<sup>17</sup> Konteks makro-historis inilah yang mendasari lahirnya kelompok pergerakan seperti Persis, di mana nilai-nilai ideologis tidak sekadar dipahami secara teoretis, melainkan dilembagakan menjadi tradisi kelompok yang membedakan mereka dari entitas sosial lainnya di sekitarnya. Dengan demikian, karakter awal organisasi ini dibentuk oleh dialektika aktif antara pemahaman keagamaan, respons politik terhadap kolonialisme, dan adaptasi kultural lokal yang berkembang pada masa tersebut.

Manifestasi dari dialektika kultural tersebut pada gilirannya melahirkan sistem simbol kolektif yang diekspresikan secara visual sebagai penanda batas identitas (*identity boundary*). Menurut Thohir, simbol peradaban yang lahir dari rahim pergerakan Islam senantiasa merepresentasikan kesadaran kelompok yang berfungsi sebagai instrumen pemersatu internal sekaligus pembeda politis terhadap hegemoni luar.<sup>18</sup> Pemahaman historis-struktural ini menjadi fondasi teoretis yang sangat krusial sebelum melakukan dekonstruksi terhadap atribut fisik organisasi.

---

<sup>17</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Politik, dan Kebudayaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 89.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

Sebelum tanda-tanda visual—khususnya pakaian dan kelengkapan atributnya—dibedah menggunakan pisau analisis Roland Barthes untuk menemukan makna konotatif dan mitosnya, struktur sosial-politik serta iklim ideologis yang melatarbelakanginya harus terlebih dahulu diposisikan sebagai ruang budaya tempat tanda tersebut diproduksi.

Kajian tentang Persatuan Islam (Persis) di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan sejarah organisasi, pemikiran tokoh, dinamika pendidikan, serta jaringan dakwahnya. Namun, hampir seluruh penelitian tersebut berfokus pada aspek kelembagaan, pemikiran, dan gerakan sosial, sementara dimensi budaya visual termasuk pakaian ulama Persis masih sangat jarang disentuh. Padahal, dalam konteks sejarah budaya Islam, pakaian bukan hanya atribut fisik, melainkan simbol identitas, strategi dakwah, dan representasi ideologi keagamaan yang dapat mencerminkan relasi kuasa pada masa kolonial. Kekosongan kajian ini membuka ruang yang luas bagi penelitian yang menggali makna simbolik pakaian sebagai bagian dari konstruksi identitas Persis pada periode tersebut.

Di antara penelitian yang paling dekat dengan tema pakaian Persis adalah karya Arip Hidayat (UIN Sunan Gunung Djati, 2018) yang membahas perkembangan gaya busana dakwah pemimpin Persis dari tahun 1923 hingga 1997. Meskipun penelitian tersebut menyinggung aspek visual berupa busana, fokus utamanya adalah memetakan perubahan gaya secara kronologis sepanjang hampir satu abad. Penelitian itu lebih bersifat deskriptif-historis, menggambarkan variasi busana dari masa ke masa tanpa menelaah secara mendalam makna simbolik atau ideologis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, cakupan tahun yang sangat panjang membuat analisis terhadap periode kolonial tidak dilakukan secara mendalam. Dengan demikian, meskipun penelitian tersebut bersinggungan dengan objek yang sama, ia belum menyentuh dimensi semiotik maupun konteks sosial-politik kolonial yang menjadi titik fokus penelitian ini.

Sementara itu, penelitian tentang sejarah Persis lainnya baik skripsi, tesis, maupun disertasi lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan, pendidikan, jaringan

ulama, atau pemikiran tokoh-tokoh Persis seperti A. Hassan atau M. Natsir. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting tentang dinamika intelektual dan sosial Persis, tetapi jarang sekali memanfaatkan sumber visual seperti foto kolonial, arsip gambar, atau ilustrasi yang muncul di majalah *Pembela Islam*. Akibatnya, aspek budaya visual Persis tidak mendapat perhatian akademik yang memadai, padahal foto dan representasi visual merupakan sumber historis yang sangat berharga untuk memahami identitas kolektif dalam konteks masyarakat kolonial.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan mengusulkan pendekatan sejarah budaya yang memanfaatkan analisis semiotik terhadap pakaian ulama Persis pada masa kolonial. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan jenis pakaian yang digunakan, tetapi juga menafsirkan makna simbolik yang melekat pada pakaian tersebut misalnya makna kesederhanaan, modernitas, kedisiplinan, atau perlawanan simbolik terhadap stereotip kolonial maupun stigma orientalis. Dengan fokus pada periode kolonial, penelitian ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap hubungan antara pakaian ulama Persis dengan dinamika sosial-politik di Hindia Belanda, termasuk bagaimana pakaian digunakan sebagai medium untuk menegosiasikan identitas keagamaan dan membangun citra “Islam modern”.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty yang jelas: ia menggabungkan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi) dengan teori semiotika untuk menafsirkan pakaian sebagai simbol budaya dalam konteks kolonial. Pendekatan ini belum pernah digunakan dalam penelitian tentang Persis sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya melengkapi historiografi Persis, tetapi juga memperluas medan kajian sejarah budaya Islam Indonesia melalui analisis visual yang kaya dan multidisipliner.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pakaian ulama bukan hanya atribut fisik, melainkan simbol budaya yang memuat nilai, identitas, dan pesan sosial keagamaan. Dalam konteks Persatuan Islam (Persis), pemilihan bentuk

pakaian pada masa kolonial memiliki relasi erat dengan gerakan pembaruan Islam yang mereka usung.

Pada masa kolonial, muncul dinamika sosial keagamaan yang kompleks: gerakan modernisme Islam, kritik terhadap praktik keagamaan tradisional, hingga tekanan wacana orientalis yang menggambarkan umat Islam sebagai tradisional dan tidak modern. Dalam situasi inilah ulama Persis melakukan pembaruan tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga pada representasi visual, salah satunya melalui pakaian. Fenomena ini mendorong pertanyaan historis, mengapa pakaian tertentu dipilih, apa maknanya, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan identitas gerakan Persis?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan sejarah budaya melalui metode penelitian sejarah:

1. Heuristik, mengumpulkan sumber-sumber seperti foto kolonial, majalah al-Furqan dan al-Mizan, arsip Persis, serta literatur akademik.
2. Kritik sumber, untuk menilai otentisitas dan kredibilitas visual maupun teks.
3. Interpretasi, yaitu menafsirkan data sejarah dengan pendekatan semiotika.
4. Historiografi, menyusun narasi historis secara ilmiah.

Pendekatan semiotika digunakan untuk mengurai makna simbolik pakaian ulama Persis. Mengacu pada pemikiran Roland Barthes, pakaian dapat dibaca sebagai tanda yang terdiri dari bentuk fisik (*representamen*), objek (nilai yang dirujuk), dan interpretant (makna budaya yang ditangkap masyarakat). Melalui semiotika, pakaian ulama Persis misalnya jas, peci hitam, kemeja, atau sarung tidak hanya dilihat sebagai busana, tetapi sebagai tanda identitas modernisme Islam, sebagai bentuk disiplin, kesederhanaan, dan profesionalisme.

Secara historis, pemilihan pakaian tersebut juga merupakan upaya membedakan diri dari ulama tradisional yang memakai jubah panjang, sorban, atau pakaian pesantren. Perbedaan ini bukan hanya estetis, tetapi mencerminkan perbedaan ideologi, orientasi keagamaan, dan strategi dakwah. Dengan demikian,

pakaian ulama Persis menjadi bagian dari konstruksi identitas kolektif di tengah persaingan wacana antara modernisme dan tradisionalisme Islam pada masa kolonial.

Kerangka berpikir ini kemudian mengarah pada tiga fokus analisis:

1. Deskripsi historis pakaian ulama Persis pada masa kolonial berdasarkan sumber visual dan teks.
2. Analisis gaya berpakaian tersebut melalui teori semiotika.
3. Penjelasan hubungan antara gaya berpakaian dan identitas pembaruan Persis, termasuk posisinya dalam lanskap sosial keagamaan pada era kolonial.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pakaian ulama Persis sebagai pintu masuk untuk memahami konstruksi identitas, strategi dakwah, dan dinamika perubahan budaya Islam Indonesia pada masa kolonial. Kerangka berpikir ini sekaligus menunjukkan bahwa pakaian bukan sekadar busana, tetapi media simbolik yang memuat pesan ideologis, sejarah, dan budaya.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan analisis semiotika sebagai instrumen analitis utama. Arsip dan foto masa lalu tidak dapat dibaca secara ahistoris, melainkan harus diperlakukan sebagai bukti empiris yang membutuhkan kritik sumber. Sebagaimana dijelaskan oleh Ajid Thohir mengenai metodologi kajian sejarah Islam, setiap peninggalan masa lalu, baik berupa teks maupun artefak (termasuk visual), harus melalui proses penelusuran dan verifikasi yang ketat guna menguji otentisitas serta kredibilitasnya sebelum diposisikan sebagai fakta sejarah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, sebelum gambar-gambar pakaian dan kelengkapan atribut tersebut dibedah menggunakan teori konotasi dan mitos dari Roland Barthes, data-data visual ini divalidasi terlebih dahulu menggunakan kaidah historis. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa representasi visual yang dianalisis benar-benar otentik dan secara faktual merepresentasikan kondisi sosiologis serta ideologis Persis pada rentang periode yang diteliti.

---

<sup>19</sup> Ajid Thohir, *Studi Sejarah Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 52.

Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau<sup>20</sup> yang berarti penelitian sejarah tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menguji validitas dan maknanya.

### 1. Heuristik

Heuristik adalah tahap awal berupa upaya mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut Sartono Kartodirdjo, tahap pengumpulan sumber atau heuristik tidak bisa dipisahkan dari perspektif ilmu sosial. Baginya, peneliti harus memiliki kepekaan untuk mencari sumber yang tidak hanya bersifat "top-down" (dokumen resmi negara), tetapi juga sumber-sumber yang mampu mengungkap struktur sosial dan aktivitas masyarakat bawah melalui pendekatan multidimensional.<sup>21</sup>

Sementara itu, Kuntowijoyo menekankan bahwa heuristik bukan sekadar aktivitas fisik mengumpulkan benda, melainkan sebuah proses intelektual. Peneliti harus memiliki "kedekatan emosional" dan "kedekatan intelektual" terhadap sumber agar mampu mengidentifikasi mana data yang benar-benar mengandung informasi penting bagi narasi sejarah.<sup>22</sup>

Taufik Abdullah memberikan penekanan pada pentingnya konteks dalam pengumpulan sumber. Ia memandang bahwa heuristik dalam sejarah intelektual dan sejarah lokal menuntut peneliti untuk jeli melihat keterkaitan antara naskah-naskah tradisional (seperti babad atau hikayat) dengan dokumen-dokumen kolonial guna mendapatkan gambaran yang lebih objektif.<sup>23</sup>

Dalam ranah teknis, Helius Syamsuddin merincikan bahwa heuristik mencakup pelacakan sumber primer dan sekunder melalui berbagai lembaga

---

<sup>20</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1957), hlm. 48.

<sup>21</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 18.

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 94.

<sup>23</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah: Historiografi dan Metodologi*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 42.

kearsipan dan perpustakaan. Ia mengingatkan bahwa peneliti harus memahami sistem klasifikasi arsip agar proses penemuan sumber dapat berjalan secara sistematis dan efisien.<sup>24</sup>

Terakhir, pakar metodologi asal Amerika Serikat, Louis Gottschalk, menegaskan bahwa kemampuan seorang sejarawan sering kali diuji pada tahap ini. Baginya, keberhasilan seorang peneliti sejarah sangat bergantung pada "kemujuran" dan ketekunan dalam menelusuri setiap bukti tertulis maupun lisan yang masih tersisa dari masa lampau.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, heuristik akan difokuskan pada:

- a. Foto-foto ulama Persis pada masa kolonial yang tersebar dalam arsip keluarga, majalah *Pembela Islam*, dokumen Persis, dan koleksi digital.
- b. Tulisan dan artikel tokoh Persis seperti A. Hassan, M Natsir, dan tokoh lainnya yang memuat deskripsi tentang pakaian, etos kesederhanaan, atau konstruksi identitas.
- c. Arsip kolonial Hindia Belanda yang mungkin memotret interaksi masyarakat Muslim modernis.
- d. Literatur dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sejarah Persis atau budaya pakaian Islam.

Sumber-sumber visual sangat penting karena pakaian merupakan objek material sekaligus simbolik. Roland Barthes menyebut foto sebagai "*pesan tanpa kode*" dan sekaligus "*pesan berkode*" karena ia menampilkan fakta visual namun juga mengandung makna budaya.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencari sumber atau heuristik ke beberapa tempat yang dipandang menyimpan sumber primer tersebut. Penulis mencari sumber ke kantor pusat organisasi Persatuan Islam yang berada di

<sup>24</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 86.

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

<sup>26</sup> Roland Barthes, *Image, Music, Text* (London: Fontana Press, 1977), hlm. 15–18.

Bandung, Perpustakaan Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (DISPUSIPDA), dan juga mencari sumber visual di internet.

## 2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan proses penyaringan secara kritis terhadap materi sejarah untuk mendapatkan fakta yang objektif. Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa kritik adalah upaya untuk melepaskan unsur-unsur subjektivitas dari sebuah sumber. Dalam pendekatan multidimensional, kritik tidak hanya dilakukan pada teks, tetapi juga pada latar belakang sosiologis penulis sumber tersebut guna mendeteksi adanya bias kepentingan.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Kuntowijoyo, kritik terbagi menjadi dua aspek, yakni kritik eksternal (otentisitas) dan kritik internal (kredibilitas). Kritik eksternal bertujuan untuk menguji apakah sumber tersebut secara fisik asli (bukan tiruan), sedangkan kritik internal bertujuan untuk menguji apakah isi atau narasi di dalam sumber tersebut dapat dipercaya kebenarannya.<sup>28</sup>

Taufik Abdullah menekankan bahwa seorang sejarawan harus memiliki sikap skeptis yang sehat (*methodological skepticism*) saat berhadapan dengan sumber. Ia berargumen bahwa verifikasi adalah proses "mempertanyakan kembali" setiap klaim yang ada dalam dokumen, terutama jika dokumen tersebut merupakan produk kekuasaan yang cenderung memihak.<sup>29</sup>

Secara lebih teknis, Helius Syamsuddin merinci bahwa dalam kritik eksternal, peneliti harus melakukan pengujian terhadap aspek fisik seperti usia kertas, tinta, hingga gaya bahasa (paleografi/diplomatik). Sementara dalam kritik internal, peneliti harus melakukan "perbandingan silang" (*cross-checking*) antar berbagai sumber yang sezaman untuk melihat konsistensi informasi.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 24.

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 100.

<sup>29</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah: Historiografi dan Metodologi*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 51.

<sup>30</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 133-135.

Senada dengan hal tersebut, Louis Gottschalk menyatakan bahwa kritik internal adalah tahap untuk menetapkan "fakta sejarah". Baginya, sebuah kesaksian dalam sumber tidak boleh dianggap benar sampai kesaksian tersebut diuji kebenarannya secara independen dan tidak mengandung kontradiksi logika.<sup>31</sup>

Dalam tahapan kritik eksternal penulis mencoba untuk menilai keaslian sumber dari aspek fisik dan asal-usulnya, misalnya: Apakah foto yang ditemukan benar berasal dari periode kolonial? Apakah arsip atau majalah tersebut merupakan edisi asli? Apakah identifikasi tokoh dalam foto dapat diverifikasi? Proses ini penting agar peneliti tidak menggunakan sumber yang salah tahun atau salah identifikasi.

Adapun dalam tahapan kritik internal penulis mencoba untuk menilai isi dari sumber sejarah, seperti: Apakah keterangan tentang pakaian ulama Persis konsisten dengan sumber lain? Apakah tulisan tokoh Persis menunjukkan motif ideologis tertentu? Bagaimana bias kolonial atau bias kelompok modernis memengaruhi narasi? Kuntowijoyo menegaskan bahwa kritik internal menuntut kemampuan analisis kontekstual agar peneliti dapat memahami makna di balik teks dan visual.<sup>32</sup>

### 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah tahap di mana peneliti memberikan makna pada fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa interpretasi bukan sekadar menyusun fakta secara kronologis, melainkan upaya eksplanasi (penjelasan). Dalam pendekatan multidimensional, interpretasi harus mampu mengungkap hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang kompleks antara aspek sosial, ekonomi, dan politik.<sup>33</sup>

Kuntowijoyo membagi tahap interpretasi ke dalam dua proses utama, yaitu sintesis dan analisis. Analisis berarti menguraikan fakta ke dalam bagian-bagian

<sup>31</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 97.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 59–60.

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 31.

terkecil untuk melihat detail peristiwa, sedangkan sintesis adalah menyatukan kembali fakta-fakta tersebut ke dalam sebuah kerangka besar. Ia memperingatkan agar interpretasi tetap bersifat objektif dan tidak terjebak pada imajinasi liar yang tidak berdasar pada data.<sup>34</sup>

Taufik Abdullah memandang interpretasi sebagai proses dialogis antara peneliti dengan sumber. Menurutnya, sebuah fakta sejarah tidak dapat "berbicara" sendiri; sejarawanlah yang memberi napas pada fakta tersebut melalui konstruksi pemikiran yang kritis. Dalam hal ini, intelektualitas sejarawan diuji kemampuannya dalam melihat apa yang tersirat di balik yang tersurat dalam sebuah peristiwa.<sup>35</sup>

Dalam perspektif yang lebih teknis, Helius Syamsuddin menekankan bahwa interpretasi sejarah bersifat subjektif namun harus tetap ilmiah. Subjektivitas ini muncul karena setiap peneliti memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, namun hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan selama peneliti menggunakan kerangka teoretis yang konsisten dan tidak memanipulasi fakta demi kepentingan tertentu.<sup>36</sup>

Louis Gottschalk menambahkan bahwa interpretasi dalam sejarah sering kali melibatkan proses inferensi (penarikan kesimpulan logis). Peneliti harus mampu mengisi celah-celah kosong dalam catatan sejarah dengan dugaan yang masuk akal (*reasonable hypothesis*) berdasarkan konteks zaman yang sedang diteliti, sehingga narasi sejarah menjadi utuh dan dapat dipahami.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan pendekatan sejarah dan dilengkapi dengan bantuan semiotika. Adapun metode interpretasi sejarah, penulis mencoba untuk menafsirkan konteks sosial, politik, dan keagamaan Hindia Belanda yang membentuk pilihan pakaian ulama Persis. Faktor-faktor seperti modernisme

---

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 102.

<sup>35</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah: Historiografi dan Metodologi*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 58.

<sup>36</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 161.

<sup>37</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 115.

Islam, resistensi simbolik, dan perbedaan identitas dengan ulama tradisional akan ditelaah.

Untuk membedah kompleksitas makna busana ulama Persis di tengah dinamika masyarakat kolonial, penelitian ini mengadopsi pendekatan hibrida yang mengintegrasikan dua kerangka teoretis, yakni Semiotika Struktural dan Semiotika Budaya. Integrasi ini dirancang untuk membaca sistem busana secara komprehensif, mulai dari tataran materialitas objek (mikro) hingga posisinya dalam konstelasi peradaban dan kesejarahan (makro).

Sebagai instrumen analisis mikro, penelitian ini menggunakan semiotika struktural Roland Barthes untuk mempreteli struktur visual dan elemen fisik pakaian. Dalam paradigma Barthesian, pakaian tidak ditempatkan sekadar sebagai objek fungsional pelindung tubuh, melainkan dikonseptualisasikan sebagai sebuah sistem tanda (*sign system*) yang terstruktur dan memproduksi makna ideologis dalam ranah sosial.<sup>38</sup> Analisis mikro ini beroperasi melalui dua tingkatan signifikasi. Signifikasi tingkat pertama, yakni denotasi, digunakan untuk membaca makna objektif, harfiah, dan material dari elemen fisik pakaian, seperti potongan jas, jenis kain sarung, presisi kerah, hingga ketiadaan ornamen pada peci.<sup>39</sup>

Setelah struktur fisik terpetakan, pisau analisis bergerak menuju signifikasi tingkat kedua yang mencakup konotasi dan mitos. Konotasi membongkar makna terselubung dan nilai ideologis yang dilekatkan pada elemen visual tersebut. Sementara itu, konsep mitos dalam terminologi Barthes digunakan untuk membedah bagaimana kebudayaan (dalam hal ini, gerakan pembaruan Islam) menaturalisasi makna ideologis tersebut sehingga konstruksi sosiologis—seperti rasionalitas, efisiensi, dan purifikasi ajaran—dianggap sebagai sebuah kebenaran kodrati yang terpancar dari pakaian tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Roland Barthes, *The Fashion System*, terj. Matthew Ward dan Richard Howard (Berkeley: University of California Press, 1990), 27-28.

<sup>39</sup> Roland Barthes, *Elements of Semiology*, terj. Annette Lavers dan Colin Smith (New York: Hill and Wang, 1967), 89-90.

<sup>40</sup> Roland Barthes, *Mythologies*, terj. Annette Lavers (London: Paladin, 1973), 114-115.

Jika Barthes digunakan untuk membongkar tatanan internal tanda pada level mikro, penelitian ini mengadopsi semiotika budaya Yuri Lotman sebagai instrumen analisis makro. Pendekatan ini mentransformasikan pandangan terhadap busana: dari sekadar "sistem tanda" menjadi sebuah "teks kultural" yang hidup dan beroperasi di dalam sebuah *Semiosfer*. Lotman mendefinisikan *Semiosfer* sebagai ruang semiotik holistik di mana berbagai teks kebudayaan saling bersinggungan, berinteraksi, dan memproduksi makna historis.<sup>41</sup>

Dalam konstelasi masyarakat Hindia Belanda yang terfragmentasi, pakaian ulama Persis dikaji menggunakan konsep *Boundary* (batas atau titik temu budaya). Bagi Lotman, batas kultural bukanlah dinding pemisah yang kaku, melainkan sebuah filter atau membran tempat terjadinya dialog dan interaksi intensif antara kebudayaan luar (*extra-systemic*, seperti rasionalitas Barat) dan kebudayaan dalam (*intra-systemic*, seperti tradisi pesantren lokal).<sup>42</sup> Di titik batas inilah terjadi apa yang disebut sebagai *Cultural Translation* (penerjemahan budaya). Melalui konsep ini, persandingan elemen Barat (jas, dasi) dan elemen lokal (sarung, peci) dibaca bukan sebagai asimilasi buta atau westernisasi, melainkan sebagai agensi aktif peradaban Islam dalam menerjemahkan dan mengadopsi instrumen kemajuan global ke dalam sintaksis puritanisme ajaran.

Pada konklusinya, hasil dari penerjemahan budaya yang diartikulasikan melalui tatanan busana ini mengalami kristalisasi menjadi *Cultural Memory* (memori budaya).<sup>43</sup> Pakaian berubah wujud menjadi monumen sejarah tak berbenda yang merekam ketangguhan peradaban Islam Nusantara dalam berdialog dengan modernitas, sekaligus meneguhkan dan mewariskan identitas rasionalisme gerakan Islam modern kepada generasi penerusnya.

#### 4. Historiografi

---

<sup>41</sup> Yuri M. Lotman, *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*, terj. Ann Shukman (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 123-125.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 136-137

<sup>43</sup> Yuri M. Lotman, *Culture and Explosion*, terj. Wilma Clark (Berlin: Mouton de Gruyter, 2009), 145-147.

Historiografi merupakan tahap penyajian atau penulisan sejarah sebagai sebuah kisah yang utuh. Sartono Kartodirdjo memandang historiografi bukan sekadar laporan teknis, melainkan sebuah rekonstruksi masa lampau yang memiliki bobot intelektual. Bagi Sartono, penulisan sejarah yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam sebuah narasi yang analitis, sehingga sejarah tidak hanya menjadi deskripsi kronologis yang kering.<sup>44</sup>

Kuntowijoyo menekankan bahwa historiografi adalah cara sejarawan mengomunikasikan hasil pemikirannya. Ia membagi penulisan sejarah menjadi beberapa jenis, seperti historiografi tradisional, kolonial, dan nasional. Kuntowijoyo mengingatkan bahwa dalam penulisan sejarah, seorang peneliti harus memperhatikan aspek kronologi (urutan waktu) dan tipologi (pengelompokan masalah) agar pembaca dapat memahami logika peristiwa secara jernih.<sup>45</sup>

Menurut Taufik Abdullah, historiografi mencerminkan perkembangan intelektual suatu bangsa. Ia menekankan bahwa penulisan sejarah memiliki fungsi pedagogis dan legitimasi. Oleh karena itu, sejarawan memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan narasi yang jujur namun tetap mampu memberikan makna bagi identitas kontemporer, terutama dalam konteks historiografi Indonesia yang dinamis.<sup>46</sup>

Helius Syamsuddin memberikan rincian teknis mengenai struktur penulisan. Ia menyatakan bahwa historiografi harus memenuhi standar penulisan ilmiah yang mencakup pengantar, narasi utama yang didukung oleh fakta-fakta kuat, serta kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Baginya, kemahiran retorika atau gaya bahasa seorang sejarawan dalam menulis sangat menentukan apakah sebuah karya sejarah akan menjadi rujukan yang hidup atau sekadar tumpukan kertas.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 43.

<sup>45</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 104.

<sup>46</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah: Historiografi dan Metodologi*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 72.

<sup>47</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 175-177.

Sementara itu, Louis Gottschalk menegaskan bahwa tujuan utama historiografi adalah untuk menciptakan sebuah rekonstruksi yang semirip mungkin dengan apa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Meskipun objektivitas mutlak sulit dicapai, Gottschalk berargumen bahwa kepatuhan terhadap kaidah-kaidah ilmiah dan penggunaan referensi yang akurat adalah syarat mutlak agar sebuah karya historiografi dianggap sah secara akademis.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini, historiografi akan berbentuk: Narasi sejarah budaya mengenai pakaian ulama Persis pada masa kolonial. Analisis simbolik mengenai makna pakaian sebagai identitas modernisme Islam. Diskusi mengenai diferensiasi Persis dengan ulama tradisional melalui simbol visual.

Penulisan historiografi juga harus memperhatikan kronologi, konteks sosial-politik, dan kontinuitas perubahan budaya berpakaian dalam gerakan Persis.



---

<sup>48</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 128.